

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dapat diartikan sebagai penjelasan secara rinci tentang apa yang akan dibahas oleh peneliti terkait dengan masalah penelitian, dengan adanya kajian pustaka maka akan mempermudah pembaca untuk memahami kajian yang akan dibahas. Kajian Pustaka ini akan membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan “Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (Studi Kasus: Di Kecamatan Coblong)”.

##### 2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh referensi, memperluas pemahaman terhadap teori yang digunakan, serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, sekaligus menjadi sumber masukan dan inspirasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih empat penelitian terdahulu, antara lain:

- 1. Amita Riani, Sri Suwitri, dan Yuni Kurniasih (2024) mengenai Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amita Riani, Sri Suwitri, dan Yuni Kurniasih bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan terkait Program

Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif deskriptif, dengan data penelitian yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn serta Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2015:72) dengan berfokus kepada aspek komunikasi dan sumber daya. Desa Sambak dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan salah satu desa di Kabupaten Magelang yang telah berhasil memperoleh penghargaan ProKlim Utama pada tahun 2017 dan ProKlim Lestari pada tahun 2021, sehingga menjadi representasi daerah yang telah menjalankan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara aktif. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, lembaga pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Hasil penelitian Amita Riani, Sri Suwitri, dan Yuni Kurniasih menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Pembentukan Tim Pokja ProKlim Desa Sambak merupakan langkah strategis dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, namun peranan tim ini dinilai belum berjalan secara maksimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan ketersediaan waktu anggota tim akibat kesibukan individu seperti pekerjaan atau pendidikan, potensi konflik sosial yang timbul dari perbedaan latar belakang dan paradigma masyarakat, serta keterbatasan

sarana prasarana dan sumber daya finansial yang menjadi hambatan serius dalam pengembangan program. Selain itu, akses informasi yang harus melewati berlapis-lapis birokrasi juga memperlambat kinerja Tim Pokja ProKlim dalam memastikan ketersediaan informasi bagi masyarakat.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amita Riani, Sri Suwitri, dan Yuni Kurniasih dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama membahas faktor komunikasi dan sumber daya sebagai aspek penting dalam pelaksanaan program, serta menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam keberhasilan implementasi kebijakan ProKlim.

Perbedaan penelitian Amita Riani, Sri Suwitri, dan Yuni Kurniasih dengan peneliti terletak pada teori implementasi kebijakan yang digunakan, pendekatan penelitian, serta lokus penelitian. Penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn serta Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2015:72) dengan fokus pada aspek komunikasi dan sumber daya, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Sementara itu, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Agustino, 2016) yang mengkaji implementasi kebijakan secara lebih komprehensif melalui enam variabel secara menyeluruh,

dengan pendekatan kualitatif studi kasus di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, serta menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai aktor pelaksana utama selaku instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program.

**2. Edward Mandala, Rendra Setyadiharja, Nurbaiti Usman Siam, Suhardi Mukhlis, dan Zangki Firdaus (2025) mengenai Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang.**

Penelitian yang dilakukan oleh Edward Mandala et al. berfokus pada implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di mana sebagian besar masyarakat dan Kelompok Pelaksana Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis tidak lagi aktif menjalankan kegiatan-kegiatan ProKlim, padahal program tersebut telah berjalan selama hampir lima tahun sejak tahun 2019. Pelaksanaan ProKlim di Kelurahan Kampung Bugis didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Populasi penelitian adalah Kelompok Pelaksana Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis yang berjumlah 74 orang, dengan sampel dipilih secara purposive sampling sebanyak 6 orang dari dua kelompok berbeda, yaitu kelompok yang dianggap paling berhasil (Kelompok Sungai Ladi Asri di RW 3) dan kelompok yang belum berkembang (Kelompok Sumaru Mangrove di RW 5).

Hasil penelitian Edward Mandala et al. menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis secara keseluruhan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Ditinjau dari enam faktor Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99), standar dan sasaran kebijakan ProKlim telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun masih terdapat perbedaan pemahaman di antara anggota kelompok pelaksana. Sumber daya manusia yang tersedia dinilai cukup aktif, meskipun pengelolaan fasilitas seperti TPS3R masih perlu diperbaiki. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan kelompok pelaksana berjalan dengan baik melalui komunikasi digital maupun pertemuan langsung, namun pada beberapa kasus dinilai masih perlu ditingkatkan. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan kepatuhan yang baik di awal pembentukan kelompok, namun keberlanjutan operasional program mengalami penurunan. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dinilai mendukung pelaksanaan ProKlim, dan disposisi implementor menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan program.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Edward Mandala et al. dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta menempatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu aktor penting dalam pelaksanaan program.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Edward Mandala et al. dengan peneliti terletak pada lokus penelitian, pendekatan penelitian, fokus kajian, serta kondisi implementasi yang diteliti. Penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, berfokus pada kondisi ProKlim yang mengalami penurunan keaktifan di sebagian besar wilayah kelurahan. Adapun peneliti mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus di Kecamatan Cobleng, Kota Bandung, serta menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai aktor pelaksana utama selaku instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Agustino, 2016) sebagai kerangka analisis.

### **3. Suci Fitria dan Wazni (2022) mengenai Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru Tahun 2020.**

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Fitria dan Wazni bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, serta dokumen resmi. Kerangka teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi,

karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kelurahan Tobek Godang dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan satu-satunya kelurahan di Kota Pekanbaru dari 83 kelurahan yang berhasil memperoleh sertifikat ProKlim Utama pada tahun 2020 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 401/MENLHK/PPI/PPI.0/10/2020 dengan skor validasi SRN sebesar 86,53 % (melebihi ambang batas  $\geq 81$  %). Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pusat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, lurah beserta jajarannya, RT/RW, Karang Taruna, hingga kelompok masyarakat di tingkat RW 02.

Hasil penelitian Suci Fitria dan Wazni menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ProKlim di Kelurahan Tobek Godang telah berjalan dan terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kendala utama berupa kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada kelompok masyarakat dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Standar serta sasaran kebijakan telah dipahami dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta Lurah Tobek Godang, ditandai dengan komitmen dan motivasi yang tinggi, pelaksanaan tugas pokok sesuai SOP dalam Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nomor 4 Tahun 2021, serta keselarasan dengan visi misi Gubernur Riau mendukung Program Riau Hijau. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil menghasilkan perubahan signifikan pada kegiatan ProKlim yang ramah lingkungan di Kelurahan Tobek Godang, terutama di

RW 02, walaupun sebagian kecil masyarakat masih melakukan pembakaran sisa panen dan kurang aktif dalam koordinasi kolektif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suci Fitria dan Wazni dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai upaya pemerintah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder, serta mengaplikasikan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn secara menyeluruh melalui enam variabel. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti peran berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, kelurahan, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ProKlim.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suci Fitria dan Wazni dengan peneliti terletak pada lokus penelitian, pendekatan penelitian, dan aktor pelaksana utama. Penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta pemerintah kelurahan sebagai aktor utama pada tahun 2020. Sementara itu, peneliti mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, serta menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai aktor pelaksana utama selaku instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program.

**4. Iin Endah Setyawati, Heri, dan Mochamad Riko Wandana (2025) mengenai Peran Program Kampung Iklim dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.**

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Endah Setyawati, Heri, dan Mochamad Riko Wandana bertujuan menganalisis implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) khususnya dalam aspek penanganan sampah di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan serius Kota Bandung dalam pengelolaan sampah, dengan produksi rata-rata mencapai 1.477 ton per hari pada tahun 2023, serta kompleksitas pengelolaan sampah di Kelurahan Cisaranten Endah yang menghasilkan timbulan sampah sebesar 155 ton per hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yang meliputi Sekretaris Kelurahan, kader Program Kampung Iklim, kader lingkungan di tingkat RW, serta masyarakat peserta program. Untuk menganalisis implementasi ProKlim, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian Iin Endah Setyawati et. al. menunjukkan bahwa implementasi ProKlim di Kelurahan Cisaranten Endah telah berjalan dengan

melibatkan pemerintah kelurahan, kader lingkungan, dan masyarakat melalui kegiatan pengomposan, pengelolaan maggot, dan bank sampah. Dari aspek komunikasi, proses transmisi berjalan secara berjenjang dari kelurahan ke tingkat RW dan RT, namun penyebarannya belum merata di seluruh wilayah. Dari aspek sumber daya, program menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, finansial, fasilitas, dan informasi, di mana banyak pelaksana bekerja secara sukarela dengan dukungan pelatihan yang terbatas. Dari aspek disposisi, antusiasme kader lingkungan dan aparat kelurahan terlihat cukup baik, namun sebagian pelaksana masih menganggap ProKlim sebagai beban tambahan akibat kurangnya insentif. Dari aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pelaporan antar RW, kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih lemah serta belum semua RW memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Upaya penanggulangan hambatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan komunikasi publik, pengembangan kemitraan lintas sektor, dan integrasi ProKlim dalam agenda pembangunan kelurahan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iin Endah Setyawati et al. dengan peneliti adalah keduanya mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di wilayah Kota Bandung dengan menggunakan metode kualitatif, serta melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai salah satu aktor pelaksana kebijakan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sama-sama membahas berbagai aspek pelaksanaan kebijakan ProKlim di tingkat

permukiman termasuk keterlibatan masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iin Endah Setyawati et al. dengan peneliti terletak pada teori yang digunakan, fokus kajian, dan lokus penelitian. Penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang berfokus pada empat indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan penekanan khusus pada aspek pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Sementara itu, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Agustino, 2016) yang mengkaji implementasi kebijakan secara lebih komprehensif melalui enam variabel secara menyeluruh, dengan pendekatan kualitatif studi kasus di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, serta menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai aktor pelaksana utama dalam pelaksanaan program.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Amita Riani, Sri Suwitri, dan Yuni Kurniasih (2024)	Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn serta Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2015:72)	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
2.	Edward Mandala, Rendra Setyadiharja,	Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan	DonaldS. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
	Nurbaiti Usman Siam, Suhardi Mukhlis, dan Zangki Firdaus (2025)	Kampung Bugis Kota Tanjungpinang	Subarsono, 2005:99)			
3.	Suci Fitria dan Wazni (2022)	Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru Tahun 2020	Van Meter dan Van Horn (1975)	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
4.	Iin Endah Setyawati, Heri, dan Mochamad Riko Wandana (2025)	Peran Program Kampung Iklim dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung	George C. Edward III (1980)	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

(Sumber: Peneliti, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, keempat penelitian terdahulu memiliki persamaan, yaitu sama sama mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim. Namun, penelitian penelitian tersebut umumnya berfokus pada pelaksanaan Program Kampung Iklim di tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang mengkaji implementasi kebijakan Program Kampung Iklim pada tingkat kecamatan dengan kondisi lingkungan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kajian implementasi kebijakan

Program Kampung Iklim di Kecamatan Coblong sebagai wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk, dengan menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai aktor pelaksana utama secara lebih spesifik dan mendalam.

### **2.1.2 Grand Theory**

#### **(1) Konsep Administrasi**

Secara etimologi (bahasa) kata administrasi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas, (2) kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang memiliki arti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Dimock dan Dimock (dalam Malawat, 2022:69) menjelaskan bahwa kata administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*ministrate*” yang memiliki arti “*to serve*”. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa administrasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam proses tersebut, manusia menjadi unsur utama karena berperan sebagai subjek sekaligus objek administrasi. Manusia merupakan sumber utama lahirnya aktivitas administrasi, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun penerima layanan. Oleh karena itu, keberadaan administrasi pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan manusia, khususnya dalam konteks kehidupan sosial yang menuntut adanya keteraturan, kerja sama, dan interaksi dalam masyarakat.

Administrasi menurut Mifta Thoha (2013, dalam Fathurrahman, 2024:1) merupakan proses kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintah maupun swasta, sipil atau militer baik

secara besar-besaran ataupun secara kecil-kecilan. Pandangan ini menekankan bahwa administrasi bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan suatu mekanisme pengelolaan kerja sama yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan.

Sejalan dengan itu, Dr. Sondang Siagian (2012, dalam Fathurrahman, 2024:3) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi ini mempertegas bahwa administrasi mengandung unsur rasionalitas, artinya setiap tindakan dalam proses administrasi harus dirancang secara logis, sistematis, dan terarah agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal.

Irra Chisyanti Dewi (2011, dalam Fathurrahman, 2024:3) menjelaskan bahwa administrasi memiliki pengertian, yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan. Pandangan ini menempatkan administrasi sebagai fungsi teknis-operasional yang mendukung kelancaran aktivitas organisasi melalui pengelolaan informasi dan dokumen secara tertib.

Ismail Nawawi (2009, dalam Fathurrahman, 2024:3) mengemukakan bahwa :

“Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerja sama yang sistematis, rasional, dan

terstruktur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi tidak hanya terbatas pada kegiatan teknis ketatausahaan, tetapi juga mencakup pengaturan kerja sama, pembagian tugas, serta pengelolaan sumber daya secara dinamis dalam organisasi. Oleh karena itu, administrasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi, baik dalam konteks pemerintahan maupun nonpemerintahan.

## **(2) Konsep Organisasi**

Organisasi berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Mariane (2018:98) mengatakan bahwa organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada dan lain sebagainya.

Robbins (dalam Aromatica dan Sudrajat, 2021:5), mengemukakan bahwa:

“Organisasi sebagai kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”.

Malinowski (dalam Aromatica dan Sudrajat, 2021:6), menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan. Aromatica dan Sudrajat (2021:6), memandang organisasi secara statis dilihat sebagai wadah yang merujuk pada nama, dan tempat. Organisasi sebagai aktivitas dilihat sebagai kumpulan orang-orang yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi ialah suatu kelompok orang yang bersatu yang saling bekerjasama atas dasar yang relatif terus menerus dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan untuk mencapai tujuan organisasi.

### **(3) Konsep Manajemen**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *man, money, methods, materials, machines and market*, disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu. Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Menurut Mariane (2018:2), mengemukakan bahwa manajemen ialah proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan dengan menggunakan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasibuan (dalam Mariane, 2018:3), menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sikula (dalam Mariane, 2018:3), mengemukakan bahwa :

“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

### **2.1.3 Middle Theory**

#### **(1) Konsep Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu administrasi dan publik. Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata *ad* yang bermakna intensif dan *ministrare* yang berarti melayani. Berdasarkan pengertian tersebut, administrasi dapat dimaknai sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Sementara itu, istilah publik merujuk pada kepentingan umum, masyarakat, atau orang banyak. Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu proses pelayanan dan pengelolaan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara luas.

Chandler dan Plano (dalam Anirwan, 2025:2) mendefinisikan Administrasi publik sebagai sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur

"*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Gordon (dalam Anirwan, 2025:2) berpendapat administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Sedangkan menurut Hughes (dalam Anirwan, 2025:3) mengatakan bahwa:

“Administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain". Pelaksanaannya didasarkan pada prosedur dengan cara menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Administrasi publik terfokus pada proses, prosedur dan kesopanan”.

Nicholas Henry (dalam Anirwan, 2025:6) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis dan rasional untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai

aktivitas teknis pelayanan, tetapi juga mencakup pengaturan organisasi, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya secara terpadu. Dengan demikian, administrasi publik menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### **(a) Unsur-Unsur Administrasi Publik**

The Liang Gie (dalam Malawat, 2022:75) ada 8 unsur administrasi, yaitu :

“1) Organisasi, pentingnya organisasi dalam administrasi publik ialah untuk mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan setiap orang serta membagikannya kepada pihak yang terkait, termasuk dalam menetapkan wewenang serta tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga bisa diartikan bahwa organisasi yang dimaksud adalah Kerjasama suatu kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. 2) Manajemen, manajemen di sini berperan untuk menggerakkan orang-orang yang terkait dalam organisasi guna mengerjakan tugasnya masing-masing, hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3) Komunikasi, kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penyampaian berita dari suatu orang ke pihak yang lain mengenai perkembangan kerja sama yang sedang dilakukan, dengan adanya komunikasi melalui suatu media yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan, maka akan timbul timbal balik serta pengertian di antara semua pihak yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. 4) Kepegawaian, rangkaian yang berkaitan dengan penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan suatu informasi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memelihara potensi yang ada dalam diri manusia guna tercapainya tujuan tertentu. 5) Pembekalan, pembekalan yang dimaksud disini ialah kegiatan yang menyangkut mengenai sarana dan prasarana yang ada, berupa kerja sama antar anggota organisasi dalam memproses pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang dipakai hingga memilah-milah barang yang sekiranya sudah tidak terpakai. 6) Keuangan, keuangan sangatlah penting guna mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, biaya yang dimaksud bisa berupa penataan maupun pengelolaan dalam perkantoran atau Perusahaan. 7) Ketatausahaan, kegiatan dalam penyediaan layanan usaha kerja sama, baik itu berupa catatan keluar masuknya barang yang diperlukan, serta pengiriman dan penyimpanan fasilitas maupun informasi yang terkait. 8) Hubungan Masyarakat, hubungan masyarakat dalam administrasi publik ialah menjaga relasi yang terjalin antar pihak internal

dan eksternal, tujuannya agar penyampaian keputusan yang telah ditetapkan bisa diterima secara sukarela”.

Berdasarkan delapan unsur tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi merupakan suatu sistem kerja yang tersusun secara terpadu dan saling mendukung. Setiap unsur memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas organisasi, mulai dari pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, komunikasi, hingga hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, administrasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis semata, tetapi sebagai suatu proses pengelolaan yang komprehensif, sistematis, dan rasional dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **(b) Peran Administrasi Publik**

Malawat (2022:130) peran administrasi publik adalah sebagai berikut :

“Administrasi publik merupakan medan dimana para aparat pemerintahan atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan layanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Selain itu, administrasi publik juga dapat dilihat sebagai ajang dimana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar para elit-elit birokrasi dan politisi memenuhi janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka. Karena itu, administrasi publik juga sangat berperan dalam menjaga kepercayaan publik”.

Cleveland (dalam Malawat, 2022:129), mengemukakan bahwa peran administrasi publik sangatlah vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Pendapat Cleveland yang diungkapkan berpuluh-puluh tahun silam ini nampaknya sejalan dengan ide Denhardt dan Denhardt (dalam Malawat, 2022:130) yang melihat bahwa administrasi publik, melalui pelayanan-pelayanan publiknya dapat memberikan atau menciptakan demokrasi.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya menjaga stabilitas negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat demokrasi, serta membangun kepercayaan publik. Administrasi publik berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, administrasi publik menjadi instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **(2) Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting yang ada dalam praktik kehidupan bernegara. Dalam memahami proses kebijakan publik itu dilaksanakan sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya sebagai sarana pemerintah dalam merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengarahkan tindakan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh ketepatan perumusan, pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.

Anderson (dalam Suratman, 2023:78) mengemukakan bahwa, "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan menurut Udoji (dalam Ghafur, 2022:39) memberi pengertian kebijakan publik sebagai, "*An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that effect society at large* (Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu masalah atau kelompok yang terkait dengan masalah tertentu yang berakibat pada masyarakat yang lebih luas)."

Dye (dalam Permana, 2023:4) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Jenkins (dalam Ghafur, 2022:65) menyatakan bahwa :

“Kebijakan publik merupakan seperangkat keputusan yang berkaitan satu sama lain yang disengaja oleh aktor politik atau kelompok politik mengenai pemilihan tujuan dan bagaimana tujuan itu dapat dicapai dalam situasi tertentu, yaitu, situasi saat keputusan dibentuk dalam situasi di bawah oknum atau kelompok itu”.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirumuskan secara sadar, sistematis, dan rasional untuk mengatasi permasalahan masyarakat serta mewujudkan kepentingan umum. Kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi fondasi utama dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### **(a) Ciri Kebijakan Publik**

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (dalam Marwiyah, 2022:13), yaitu di antaranya:

“1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri. 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan. 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu. 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada”.

Affrian (dalam Dewi, 2022:21), mengemukakan bahwa kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Ada lima ciri umum kebijakan publik:

“1) Setiap kebijakan memiliki tujuan, mempersiapkan politik tidak boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya. Jika tidak ada tujuan, maka tidak perlu membuat kebijakan. 2) Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang diarahkan pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum. 3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah. 4) Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya. 5) Kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk mematuhi.”

Dewi (2022:18), mengemukakan bahwa ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

“Ciri-ciri kebijakan publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang unik dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang tampaknya tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya. Ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan merupakan hasil pemikiran, rancangan, perumusan, dan keputusan disebut orang-orang yang berkuasa dalam sistem politik. Dalam sistem politik atau masyarakat tradisional yang sederhana, misalnya pemimpin adat atau pemimpin suku. Sedangkan dalam sistem politik yang kompleks atau masyarakat modern, mereka adalah eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki dan sejenisnya.”

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik utama berupa tujuan yang jelas, keterkaitan antar kebijakan, keterlibatan aktor pemerintah, dasar hukum yang kuat, serta keterkaitan antara perumusan dan implementasi. Kebijakan publik tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan hasil proses politik dan administratif yang sistematis dan rasional. Dengan demikian, ciri-ciri kebijakan publik menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus dirancang secara matang, dilaksanakan secara konsisten, serta diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.

### **(b) Jenis Kebijakan Publik**

Anderson yang dikutip Suharno (dalam Marwiyah, 2022:13), jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

“1) Kebijakan substantif dan kebijakan procedural, kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan. 2) Kebijakan distributif, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributif, kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan

redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. 3) Kebijakan materal dan kebijakan simbolik, kebijakan materal merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat, kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kebijakan publik mencerminkan keragaman bentuk intervensi pemerintah dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembagian ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki dimensi substansi, prosedur, distribusi manfaat, nilai simbolik, serta karakter barang atau jasa yang diatur. Dengan memahami tipologi kebijakan publik, analisis terhadap suatu kebijakan dapat dilakukan secara lebih sistematis, sehingga mampu mengidentifikasi tujuan, dampak, serta implikasi politik dan administratif yang menyertainya.

### **(c) Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (dalam Marwiyah, 2022:14)

adalah sebagai berikut :

“1) Penyusunan Agenda, penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut. 2) Formulasi Kebijakan, formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan

masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan, tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah. 4) Implementasi Kebijakan, implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. 5) Evaluasi Kebijakan, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan”.

Taufiknurohman (dalam Permana, 2023:27), mengemukakan bahwa proses

kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

“1) Pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. 2) Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. 3) Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4) Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain. 5) Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan publik merupakan rangkaian proses yang terstruktur mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil kebijakan. Proses ini mencerminkan pendekatan rasional dan analitis dalam pengambilan keputusan publik. Setiap

tahap saling berkaitan dan menentukan keberhasilan tahap berikutnya, sehingga kegagalan dalam satu fase dapat memengaruhi keseluruhan proses kebijakan. Dengan demikian, pemahaman terhadap tahapan kebijakan publik menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memiliki legitimasi yang kuat, serta mampu memberikan dampak yang efektif dan berkelanjutan.

#### **2.1.4 *Applied Theory***

##### **(1) Konsep Implementasi**

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang diwujudkan melalui serangkaian tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup penerjemahan rencana ke dalam tindakan nyata sehingga manfaat dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Grindle (dalam Anirwan, 2025:41) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Gaffar (dalam Anirwan, 2025:41) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabtier (dalam Anirwan, 2025:40), menyatakan bahwa :

"Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan ."

Syaukani (dalam Anirwan, 2025:43) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup. Pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dimulai setelah kebijakan ditetapkan secara formal, baik dalam bentuk undang-undang, keputusan eksekutif, maupun ketentuan administratif lainnya. Implementasi tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan teknis, tetapi sebagai rangkaian aktivitas administratif dan operasional yang bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam program, peraturan turunan, serta langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan di lapangan.

## **(2) Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Agustino, 2026:125)

Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Winarno (dalam Alim, 2024:101) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan adalah :

"Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik."

Wahab (dalam Rusdiyanta, 2022:268) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan proses kebijakan berupa bentuk produk hukum, dan aktivitas lanjutan sesudah diberlakukannya produk hukum tersebut. Sedangkan menurut Nugroho (dalam Rusdiyanta, 2022:268) menyatakan bahwa prinsipnya, implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, upaya untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh sebab itu sebuah kebijakan harus memiliki visi keberpihakan terutama kepada mereka yang mempunyai masalah.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang sistematis, terarah, dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Implementasi tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga melibatkan peran aktor, mekanisme koordinasi, serta penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani antara perencanaan kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan oleh publik, sehingga

keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi pelaksanaannya.

#### **(a) Model Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai indikator atau faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap faktor memiliki kontribusi tersendiri dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejumlah ahli telah mengembangkan model implementasi kebijakan yang memuat kumpulan variabel penentu tersebut. Berikut beberapa model implementasi kebijakan :

##### 1. Model Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2026:128)

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2026:128), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yakni :

“1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil; 2) Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang

terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan; 3) Karakteristik Agen Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan; 4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan ‘dari atas’ (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan; 5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya; 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan kondisi lingkungan eksternal”.

## 2. Model Charles O. Jones (dalam Agustino, 2026:143)

Charles O. Jones (dalam Agustino, 2026:143) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

“1) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. 2) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 3) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program”.

Berdasarkan berbagai model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa model implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik serta sikap pelaksana, komunikasi dan koordinasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menata sumber daya, menafsirkan kebijakan ke dalam bentuk operasional, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan pelayanan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan proses organisasi, interpretasi, dan interaksi berbagai aktor serta lingkungan yang secara bersama-sama menentukan tercapainya tujuan kebijakan secara efektif.

### **(3) Konsep Program Kampung Iklim**

(Albar, 2017) menyatakan, bahwa Program Kampung Iklim merupakan kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkat

tapak merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.

Menurut (Hasbullah, 2025) mengemukakan, bahwa Program Kampung Iklim adalah kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkat tapak merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.

(Dewi, 2019) menyatakan, bahwa Program Kampung Iklim merupakan program sertifikasi yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi lokal dalam mengimpelentasikan tindakan di bidang iklim mengubah adaptasi dan mitigasi. Selain itu, dirancang untuk meningkatkan kesadaran lokal masalah perubahan iklim dan mending implementasi mitigasi dan lokal langkah-langkah adaptasi.

Menurut (Anhar, 2024) menyatakan, bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan inisiatif nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan proaktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi lokal

untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

(Prasetyo, 2018) mengemukakan, bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meliputi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan wilayah setingkat dusun/dukuh, RW (Rukun Warga), atau tingkat desa/kelurahan sehingga memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan suatu program yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak, yakni pada wilayah setingkat dusun, RW, desa, atau kelurahan, dengan mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama. Program ini tidak hanya bersifat teknis lingkungan, tetapi juga merupakan inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga lembaga non-pemerintah. Melalui pendekatan berbasis komunitas tersebut, ProKlim dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga pada akhirnya mendukung pencapaian target pengendalian perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun global.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan pemikiran yang disusun melalui pengintegrasian antara teori, fakta, hasil observasi, serta kajian pustaka yang relevan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Sebagai pijakan konseptual, kerangka berpikir dirumuskan untuk memaparkan hubungan antar konsep yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, kerangka berpikir juga dapat dipahami sebagai gambaran sementara mengenai fenomena atau gejala yang menjadi fokus permasalahan penelitian, yang berfungsi sebagai arah dalam proses analisis dan pembahasan.

Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu memiliki keterkaitan erat dengan konteks ekologis. Pendekatan ekologi dalam administrasi publik menegaskan bahwa sistem administrasi tidak beroperasi secara terpisah dari lingkungan, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik yang bersifat geografis, ekonomi, maupun politik dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif tersebut, isu lingkungan hidup menjadi salah satu domain publik yang bersifat strategis, sehingga menuntut peran aktif negara dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan secara sistematis dan berkelanjutan. Perubahan iklim (*climate change*) dan permasalahan persampahan merupakan dua isu ekologis utama yang secara langsung memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan respons kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi dari pemerintah. Atas dasar tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan Program Kampung Iklim sebagai instrumen kebijakan

nasional yang dirancang untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui pelibatan masyarakat dan pemerintah secara berjenjang serta partisipatif.

Kebijakan Program Kampung Iklim yang ditetapkan di tingkat nasional selanjutnya diimplementasikan secara berjenjang hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kota Bandung. Pada tingkat kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berperan sebagai instansi pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut ke dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat aplikatif di tingkat kelurahan dan Rukun Warga. Peran ini mencerminkan fungsi strategis pemerintah daerah dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam kerangka berpikir, peneliti akan menjelaskan mengenai objek penelitian dan juga objek permasalahan mengenai “Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (Studi Kasus: Di Kecamatan Coblong)”. Guna menganalisis dan mengupas persoalan implementasi tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2026:128) sebagai pisau analisis. Teori ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas proses implementasi melalui enam variabel yang saling berinteraksi, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

## 2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

### 4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

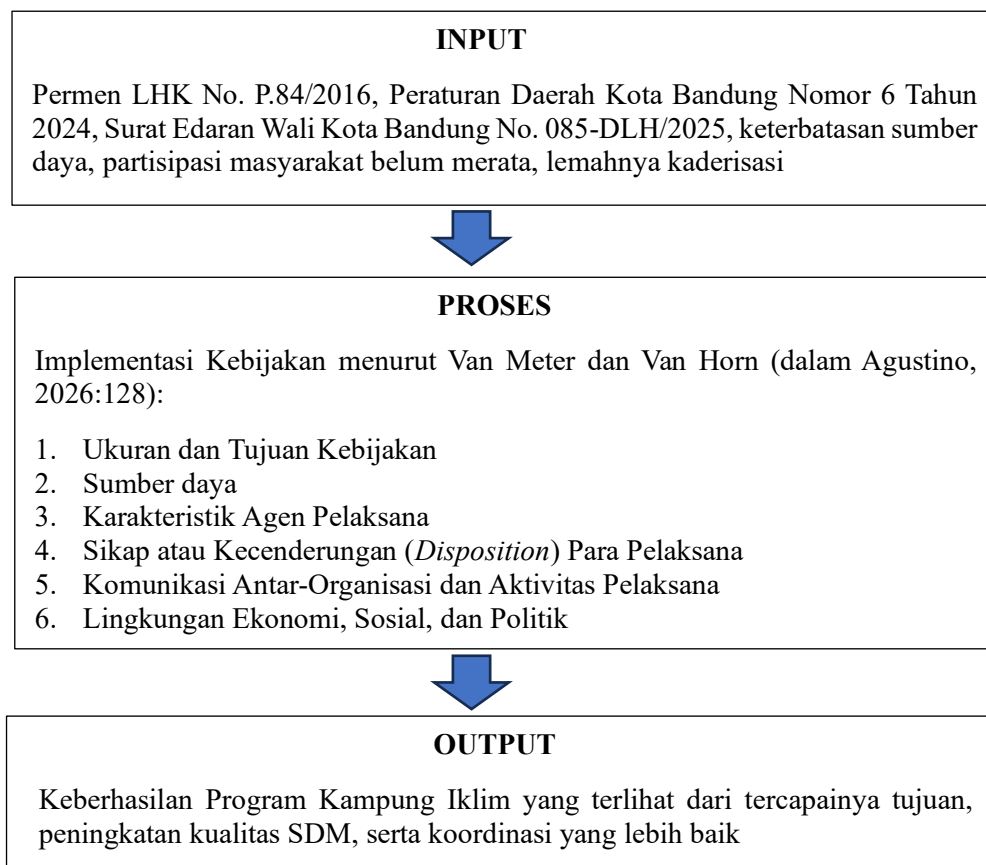
#### 5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



(Sumber: Peneliti, 2026)

### 2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian pada kerangka berpikir, maka proposisi dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (Studi Kasus: Di Kecamatan Coblong) efektif berdasarkan interaksi antara ukuran dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana menunjukkan komitmen terhadap kebijakan, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana berlangsung secara efektif, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berada dalam kondisi yang kondusif.